

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM  
DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH**

**(KASUS KOTA PADANG)**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu**

**Persyaratan Menyelesaikan Program Diploma IV**

**Politeknik Universitas Andalas**

**OLEH :**

**DESI HASNIWATI DWI PUTRI**

**06096013**



**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN DEPDIKNAS  
D IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**





No. Alumni Universitas

Desi Hasniwati Dwi Putri

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang 18/05/1979 b) Nama Orang Tua: Hasnur dan Syarniwati c) Fakultas: Politeknik Negeri Padang d) Jurusan: Akuntansi e) NIM: 06097013 f) Tgl Lulus: 30 Juli 2009 g) Predikat Lulus : Dengan pujian h) IPK: 3,68 i) Lama studi: 32 bulan k) Alamat orang tua: Jl. Intan XI/256 Pegambiran Padang

Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Kasus Kota Padang) Tugas Akhir DIV oleh Desi Hasniwati Dwi Putri, Pembimbing: 1). Irda Rosita, MEc. St, Ak, 2). Anda Dwi Haryadi, SE. Ak

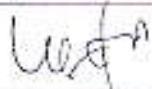

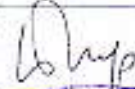

### ABSTRAK

1 Januari tahun 2001 merupakan awal diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Tugas Akhir ini bertujuan untuk membandingkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluarannya sebelum otonomi daerah (1994-2000) dan sesudah otonomi daerah (2000-2007) diberlakukan di Kota Padang. Analisa yang digunakan adalah analisa derajat desentralisasi fiskal, derajat kemandirian daerah dan upaya fiskal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kota Padang : Derajat desentralisasi fiskal pada masa sebelum otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan dengan masa sesudah otonomi daerah. Sedangkan apabila dilihat dari prosentase Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah, derajat desentralisasi fiskal pada masa sebelum otonomi daerah lebih rendah dibandingkan setelah otonomi daerah. Kemandirian daerah sebelum otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan dengan sesudah otonomi daerah. Dan upaya fiskal pada masa setelah otonomi daerah diberlakukan lebih elastis dari pada sebelum otonomi daerah.

Tugas Akhir ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Juli 2009.

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1 	2 	3 	4 
Nama Terang	Ufi Maryati, SE.M.Ak. Ak	Zahara, SE.M.Ak. Ak	Desi Hasniwati, SE. Ak	Irda Rosita, MEc. St, Ak

Mangetahui:

Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE. MM. Ak  
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam merealisasikan semangat reformasi pemerintah Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Untuk mendukung pelaksanaannya pemerintah telah menetapkan pula Undang-Undang Perimbangan Pusat dan Daerah yang sudah sejak lama ditunggu pemerintah daerah. (Syafrizal, 2001).

Kemudian keluar lagi Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 tahun 2004. Kedua Undang-Undang ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat ( UU No.32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian. (Brata, 2001)

Otonomi daerah berdasarkan UU No.22 tahun 1999 sebelumnya lebih banyak bersifat *Administrative Decentralization* yang menekankan pada *Delegation of Authority*. Dengan demikian otonomi daerah tidaklah memberikan kebebasan mutlak kepada daerah, tetapi keleluasaan yang terbatas (*Discretion at the margin*) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Syafrizal, 2001)

Pengertian otonomi daerah pada dasarnya adalah pelimpahan wewenang pengelolaan pembangunan kepada daerah, terutama kebijakan daerah (Syafrizal, 2001), dimana kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama.

Sedangkan pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003) . Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip tersebut berarti setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Di samping pelimpahan wewenang pembangunan di daerah (Simanjuntak, 1999) mengidentifikasi tiga unsur peraturan dalam otonomi daerah yaitu :

1. Adanya DPRD yang berwenang menentukan pelayanan jasa apa saja yang harus disediakan oleh pemerintah daerah bersangkutan dan pengeluaran yang diperlukan.

## BAB LIMA

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang selama periode sebelum dan sesudah otonomi daerah tahun 1994/1995 sampai 2000 dan tahun 2001 sampai 2007, secara garis besar dapat diambil kesimpulan :

1. Derajat desentralisasi fiskal yang dihitung dari proporsi PAD terhadap TPD rata-rata sebelum otonomi daerah selama periode 1994/1995 sampai 2000 sebesar 21,25 persen dan setelah otonomi daerah selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2007 adalah sebesar 15,52 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah Kota Padang terhadap pemerintah pusat sangat tinggi.
2. Jika dilihat dari derajat kemandirian daerah yaitu kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin daerah maka rata-rata selama periode sebelum otonomi daerah tahun 1994/1995 sampai tahun 2000 adalah sebesar 31,82 persen dan jika ditambah dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) mencapai 48,34 persen. Dan setelah otonomi daerah periode tahun 2001 sampai tahun 2007 rata-rata kemampuan PAD membiayai belanja rutin daerah adalah sebesar 21,28 persen, dan jika ditambah dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah sebesar 30,28 persen. Hal ini juga berindikasi bahwa

## DAFTAR PUSTAKA

- Brata, Kusumah, Deddy. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 1994*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 1995*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 1996*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 1997*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 1998*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 1999*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 2000*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 2001*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 2002*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 2003*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 2004*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 2005*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 2006*
- BPS. *Kota Padang dalam Angka tahun 2007*
- Cs.t. Kansil. 1993. *System Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPPNMP YKPN, Edisi Revisi.
- Haryati, Sri. (2006). "Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan 2001-2003". Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- Ismail, M., (2002). *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*. Malang : FE Unibraw